

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga negara memiliki peranan penting dalam sebuah negara yang memiliki nilai demokrasi di dalamnya, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dimana suatu lembaga negara terbagi menjadi tiga jenis lembaga negara diantaranya: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setiap jenis dari lembaga negara memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia (Bemby Navita et al., 2025).

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjadi lembaga eksekutif yang bergerak langsung dibawah naungan Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal (2) menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan fungsi dari pemerintahan negara untuk menjalankan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom hingga pelayan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002).

Lembaga negara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) juga berperan sebagai katalisator antara pemerintah dengan rakyat ataupun sebaliknya, tindakan yang diharapkan dari suatu lembaga diharapkan mampu untuk mencapai tujuan negara yang lebih besar. Sebagai sebuah lembaga institusi negara, POLRI memiliki tugas pokok yang harus dijalankan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal (13) diantaranya yakni: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakan hukum, dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002).

Kepolisian Republik Indonesia diharapkan mampu untuk menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial di Indonesia melalui berbagai tindakan yang mencerminkan bentuk *good governance*. *Good*

*governance* merujuk pada bagaimana cara pemerintah atau penyelenggara negara mampu untuk menjalankan program serta kebijakan yang diterapkan secara transparan, akuntabilitas, adil serta melibatkan partisipasi publik. Penerapan *good governance* dinilai sangatlah penting bagi pemerintah atau penyelenggara negara karena mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan melalui kinerja yang optimal ke berbagai lapisan masyarakat secara transparan. Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penerapan *good governance* dipercaya mampu untuk meningkatkan kepercayaan serta citra positif masyarakat terhadap pemerintah atau penyelenggara negara (Rahmawati & Tjenreng, 2025). Dengan kepercayaan dan citra yang positif, POLRI diharapkan mampu menjadi lembaga yang dapat diandalkan serta memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 pasal (13) tentang tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia.

Suatu lembaga penyelenggara negara, tidak akan pernah lepas dari sebuah pemberitaan ataupun citra dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena lembaga negara menjadi pelayan publik yang dituntut untuk terus memberikan pelayanan publik secara maksimal ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali, selain itu kebebasan masyarakat untuk menilai suatu lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu hasil evaluasi langsung antara masyarakat kepada suatu lembaga sekaligus sebagai penilaian kolektif.

Belakangan ini, institusi POLRI tengah menjadi sorotan publik akibat berbagai terpaan informasi mengenai deretan kasus yang melibatkan institusi tersebut, pemberitaan tersebut beredar di berbagai media massa baik konvensional maupun digital secara berulang, tingginya terpaan informasi tersebut tentunya memiliki hubungan dengan penilaian masyarakat terhadap POLRI, terlebih suatu informasi yang diterima akan dipahami sebagai suatu persepsi yang diyakini oleh individu kemudian akan berubah menjadi citra jika dipahami secara kolektif (Anggraelin et al., 2023). Citra yang terbentuk

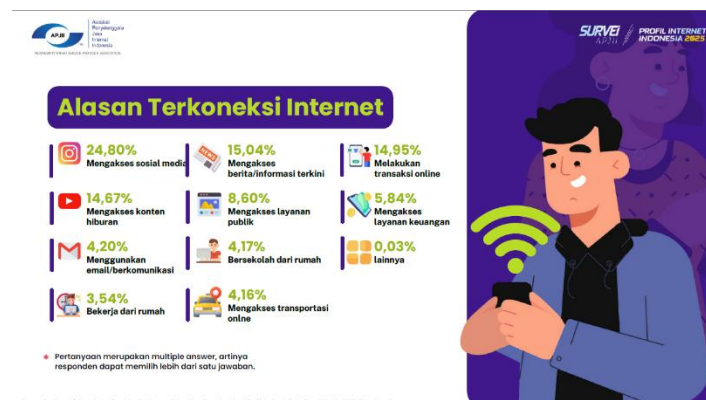
memiliki peran penting bagi suatu lembaga terutama pada aspek kepercayaan publik, karena dengan kepercayaan publik yang tinggi akan menciptakan masyarakat yang patuh sementara kepercayaan yang rendah akan menciptakan masyarakat yang resisten terhadap kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga tersebut (Azhar et al., 2024). Selain itu kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh bagaimana suatu informasi disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat (Pranata, 2025).

Citra merupakan sebuah pikiran berupa representasi keseluruhan dari persepsi dan perasaan tentang suatu produk yang dimaknai oleh khalayak terhadap suatu lembaga (Kotler & Armstrong, 2018). Citra menjadi sesuatu hal yang akan terus dimiliki oleh setiap lembaga pemerintah atau penyelenggara negara. Lembaga pemerintah haruslah memiliki citra positif dari masyarakat untuk mempertahankan kepercayaan, partisipasi publik serta mempertahankan eksistensinya (Cahyaningrum & Nuraini, 2022). Citra terbentuk melalui beberapa elemen yang saling berkaitan, terdapat beberapa tahapan dalam proses pembentukan persepsi hingga menjadi sebuah citra bagi suatu lembaga, diantaranya: (1) penangkapan informasi (*exposure*), sebagai suatu rangsangan berupa obyek yang dapat diketahui, dilihat dan didengar, (2) tahap perhatian (*attention*) proses respon alat indera dalam menangkap stimulus yang diterima, dan (3) tahap pemahaman, proses kognisi untuk memahami semua kejadian atau kegiatan dan mengarah pada proses pembentukan persepsi dan akan mempengaruhi suatu citra (Anggraelin et al., 2023).

Untuk mengetahui citra suatu lembaga terdapat empat elemen didalamnya yaitu: (1) *personality*, sebagai karakteristik lembaga yang dipahami oleh khalayak dan unsur ini akan memberikan gambaran umum tentang suatu lembaga secara keseluruhan, (2) *reputation*, sesuatu yang telah dilakukan oleh lembaga dan dipercaya oleh khalayak berdasarkan pengalaman individu ataupun pihak lain, (3) *value*, sebuah nilai-nilai atau filosofi yang dimiliki suatu lembaga, (4) *corporate identity*, komponen yang memudahkan khalayak untuk lebih mengenal lembaga (Anggraelin et al., 2023). Diantara beberapa elemen

diatas menjadi unsur yang menjadi proses dalam terbentuknya citra hingga menentukan apakah citra tersebut bernilai positif atau negatif. Jika citra bernilai positif maka akan memiliki dampak positif juga terhadap suatu lembaga, sebaliknya jika citra negatif maka akan menghasilkan dampak yang negatif juga. Oleh karena itu, penting untuk suatu lembaga negara dalam mempertahankan citra positif, karena dengan citra yang baik menandakan bahwa khalayak memiliki penilaian positif terhadap suatu lembaga (Agung, 2024) terutama di era saat ini informasi dapat menyebar secara cepat dan luas ke seluruh wilayah melalui media sosial.

Media sosial kini sudah berperan sebagai alat komunikasi dan menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk mendapatkan informasi, media sosial juga sebagai salah satu cara untuk menyebarluaskan suatu informasi secara cepat dan masif terutama di wilayah-wilayah pusat kegiatan seperti JABODETABEK. Berdasarkan data yang diakses dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan data bahwa wilayah Jawa Barat menjadi tingkat kontribusi internet terbesar yakni sebesar 17,72%. Adapun alasan penggunaan akses dari internet adalah untuk menggunakan media sosial dan mencari berbagai sumber informasi yang tersedia di berbagai *platform*.



Gambar 1. 1 Alasan Penggunaan Internet di Indonesia

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2025

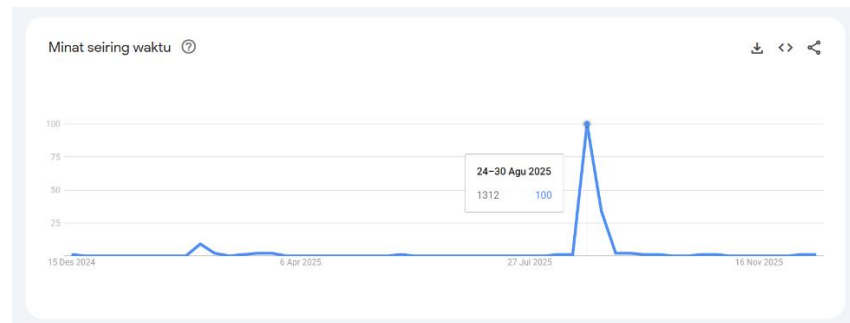
Dengan tersedianya berbagai jenis media sosial yang bisa digunakan oleh khalayak, suatu informasi dapat dengan mudah diterima maupun disebarluaskan

melalui *platform* yang tersedia. Oleh karena itu, melalui media sosial, suatu citra juga dapat dengan mudah terbentuk di benak khalayak (Damayanti et al., 2023). Salah satunya POLRI, lembaga yang berperan sebagai pengayom serta pelindung bagi para masyarakat Indonesia, melalui peran dan tugas pokoknya POLRI menjadi salah satu lembaga yang sering diterpa oleh pemberitaan di berbagai media sehingga melalui terpaan pemberitaan tersebut masyarakat seringkali melihat, membaca, bahkan mendengar informasi mengenai institusi POLRI atau kasus-kasus yang melibatkan institusi POLRI.

Kendati demikian, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas, pokok dan wewenang yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, keamanan dan kepercayaan masyarakat. Namun pada realitanya di berbagai media sosial saat ini pemberitaan negatif tentang POLRI masih tersebar luas termasuk salah satunya berakibat pada citra POLRI yang dianggap negatif. Citra negatif ini didapatkan melalui hasil beberapa lembaga survey seperti Katadata dan juga GoodStats yang memperlihatkan penilaian serta persepsi masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (GoodStats, 2025)

Terpaan pemberitaan negatif yang tersebar luas ini diakibatkan oleh beberapa kilas balik dari kejadian yang menimpa POLRI hingga menimbulkan dampak serius di khalayak, dampak dari beberapa kejadian dan terpaan negatif yang menimpa POLRI adalah ‘#ACAB’ dan ‘#1312’ di media sosial. Tagar tersebut muncul dan berperan sebagai bentuk ekspresi serta kritik dari masyarakat Indonesia atas ketidakpercayaan terhadap POLRI atas perannya sebagai pelayan serta pengayom masyarakat.

ACAB sendiri merupakan singkatan dari “*All Cops Are Bastards.*” sementara ‘1-3-1-2’ merupakan urutan dari abjad ‘A.C.A.B’ itu sendiri. Tagar ini muncul sebagai bentuk simbol protes, kecaman berskala nasional atas tindakan POLRI yang dianggap melakukan tindakan kekerasan dalam menangani masyarakat. Tagar tersebut ramai di berbagai *platform* media sosial sebagai bentuk unjuk rasa dan ketidakpercayaan terhadap lembaga institusi Kepolisian Republik Indonesia.



Gambar 1. 2 Google Trends Tagar “#1312.”

*Sumber: Google Trends 2025*

Tagar “#All Cops Are Bastards.” dan “#1.3.1.2” sering ditemui di media sosial, mengingat tagar tersebut memang digunakan sebagai bentuk kritik, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja dan tindakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terutama pada aksi demo di bulan Agustus hingga September tahun 2025 lalu.



Gambar 1. 3. Publikasi Negatif Mengenai POLRI

*Sumber X: @memilians*

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu *platform* media sosial saja, tetapi terjadi di hampir seluruh media sosial diantaranya X. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap kekecewaan mereka terhadap pihak Kepolisian dengan memberikan argumen, hingga pernyataan sikap yang dipublikasikan di akun pribadi *platform* X.



Gambar 1. 4 Informasi Negatif Mengenai POLRI

Sumber IG: @tempo.com

Saat ini tagar “*All Cops Are Bastards*” dan “#1312” telah menyebar secara luas dan masif di media sosial sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap institusi POLRI. Selain itu, banyak dari publik yang menilai bahwa Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa bekerja dengan baik dalam memberikan teladan.

Beberapa kasus yang pernah dialami oleh POLRI hingga menimbulkan emosi dan kritik publik diantaranya adalah: (1) aksi baku hantam oleh POLRI dengan sipil pada aksi demo hingga menimbulkan korban jiwa (Fauzi, 2025), (2) kasus pengeroyokan mata elang di wilayah Kalibata (Aditya & Ramadhan, 2025), (3) polemik pengesahan RUU POLRI dan RUU KUHAP yang dianggap memberikan keluasaan wewenang leluasa kepada POLRI dalam bertindak (BBC, 2025), (4) kasus penganiayaan terhadap penjual es gabus di wilayah Depok (Ramadhanty, 2026) dan (5) kasus tindak pidana yang diberikan kepada pelindung dari aksi jambret hingga menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat Indonesia (Mustaqim, 2026).



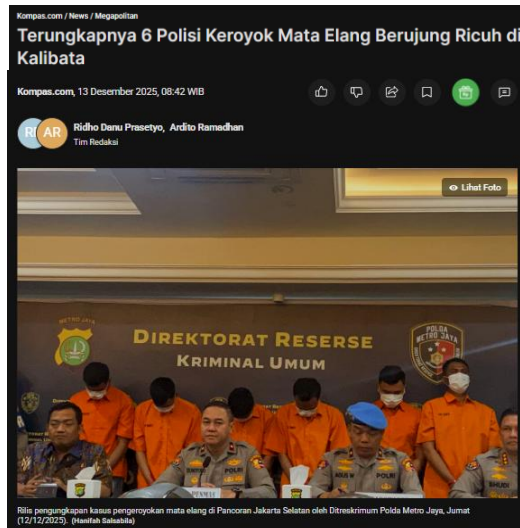
Gambar 1. 5 Pemberitaan OJOL Tewas Karena Dilindas POLRI

*Sumber: Media Indonesia, 2025*

Pada aksi demo yang terjadi di bulan Agustus tahun 2025, terdapat salah satu pemberitaan negatif yang melibatkan institusi POLRI didalamnya, pemberitaan negatif tersebut diakibatkan oleh tewasnya seorang *driver* ojek *online* (OJOL) yang diketahui korban bernama Affan Kurniawan. Affan Kurniawan dilindas dengan menggunakan kendaraan taktis oleh BRIMOB. Kejadian tersebut menjadi puncak kemarahan masyarakat terhadap tindakan keji yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat sipil (Fauzi, 2025)

Kejadian yang menewaskan salah satu masyarakat sipil tersebut membuat tagar “#All Cops Are Bastards.” dan “#1.3.1.2” meledak di media sosial, tagar tersebut ditujukan kepada pihak Kepolisian sebagai bentuk kritik, emosi terhadap tindakan yang dianggap keji (Kompas News, 2025). Berbagai pemberitaan juga turut meliput kejadian tersebut yang menyebabkan tuntutan segera bagi pihak Kepolisian untuk menindaklanjuti bagi para pelaku yang berada di dalam kendaraan taktis BRIMOB tersebut. Terlebih, setelah ditelusuri lebih lanjut bahwa Affan Kurniawan bukanlah seorang pendemo melainkan sedang menjalankan tugas mengantar makanan kepada konsumen yang berada di sekitar daerah tersebut, korban berusaha menghindari kerumunan namun

sempat terjatuh di tengah kerumunan pendemo hingga akhirnya dilindas oleh BRIMOB dengan menggunakan kendaraan taktis.



Gambar 1. 6 Polisi Mengeroyok Mata Elang

*Sumber: Kompas.com*

Pada akhir bulan Desember tahun 2025 lalu, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terlibat lagi dalam pemberitaan pembunuhan yang mengakibatkan dua mata elang (*debt collector*) meninggal usai dikeroyok oleh 6 oknum anggota POLRI di wilayah Kalibata. Pengeroyokan terjadi karena pihak oknum polisi tidak terima kendaraannya diberhentikan oleh *debt collector*, aksi ini sekaligus mengakibatkan aksi ricuh dan bentrok di lokasi hingga kebakaran beberapa kios pedagang di wilayah sekitar (Aditya & Ramadhan, 2025).

### Kontroversi RUU Polri dan RUU KUHP – Apa saja yang bermasalah dan poin apa yang seharusnya dimuat?



Gambar 1. 7 Kontroversi RUU POLRI dan KUHP

*Sumber: BBC Indonesia*

Masih di tahun 2025, Kepolisian Republik Indonesia kembali mendapatkan berbagai kritikan tajam akibat pengesahan RUU POLRI dan RUU KUHP yang dianggap memperbolehkan anggota POLRI untuk melakukan rangkap kepemimpinan pada beberapa instansi. Selain itu, beberapa pasal di dalam RUU tersebut dianggap sebagai upaya untuk memperkuat POLRI dan melemahkan kekuatan masyarakat ketika masyarakat terlibat di dalam suatu perkara hukum (BBC, 2025).

### Dugaan penganiayaan pedagang es gabus – Apa dampaknya jika tindak pidana diselesaikan dengan permintaan maaf dan hadiah?



KOMPAS.COM/DINDA AULIA RAMADHANTY

Sudrajat, pedagang es gabus yang dituduh menggunakan spons saat ditemui wartawan di rumahnya di Rawa Panjang, Kabupaten Bogor, Selasa (27/01).

Gambar 1. 8 Penganiayaan Penjual Es Gabus

*Sumber: BBC Indonesia*

Selanjutnya, pada awal bulan Januari tahun 2026, instansi POLRI kembali dibuat heboh dengan pemberitaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Polisi terhadap penjual es gabus di wilayah Depok, Jawa Barat. Penganiayaan yang dilakukan disebabkan karena beredarnya rumor bahwa penjual es gabus menjual makanan yang tidak layak, namun rumor tersebut ternyata salah sehingga menyebabkan oknum polisi yang bertindak seenaknya mendapatkan berbagai kecaman dari masyarakat karena aksinya yang dinilai tidak berempati terhadap masyarakat (Ramadhanty, 2026)

Selain itu, masih di bulan yang sama di wilayah Sleman, seorang suami bernama Hogi ditetapkan sebagai tersangka dengan tindak pidana karena dianggap mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan seorang jambret meninggal dunia. Hogi melakukan aksi pengejaran kepada jambret yang telah mencuri tas istrinya hingga sang jambret meninggal dunia karena menabrak pembatas jalan. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Hogi bersalah atas tindakannya, akibatnya setelah informasi tersebut beredar, publik menilai bahwa POLRI tidak mampu untuk bekerja secara rasional dan optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (Mustaqim, 2026)



Gambar 1. 9 Tindak Pidana Kasus Hogi

*Sumber: KompasTV*

Dari berbagai terpaan pemberitaan informasi mengenai deretan kasus-kasus yang dialami Kepolisian Republik Indonesia telah menyebabkan citra POLRI menurun. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Databoks dan GoodStats pada penilaian masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia.



Gambar 1. 10 Pengalaman Buruk Ketika Berurusan Dengan POLRI

*Sumber: GoodStats*

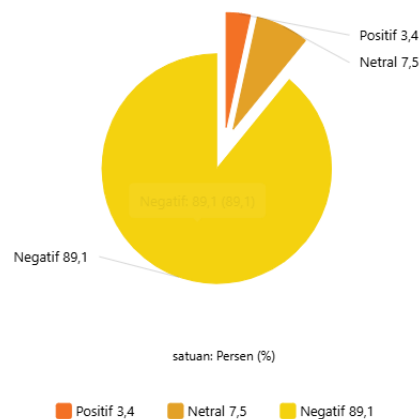
Sebagian masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan pihak Kepolisian dalam survei yang dilakukan oleh GoodStats menyatakan sebanyak 66,2% mengalami pengalaman buruk ketika berurusan dengan polisi (GoodStats, 2025) Sebagian masyarakat menganggap bahwa pihak Kepolisian masih sering untuk melakukan praktik pungutan liar (pungli) terutama ketika proses pembuatan SIM, SKCK, atau bahkan perpanjangan STNK.



Gambar 1. 11 Keyakinan Terhadap POLRI

*Sumber: GoodStats*

Masyarakat juga menilai bahwa tingkat keyakinan mereka terhadap pihak Kepolisian rendah dengan tingkat keyakinan sebesar 40,9% tidak yakin polisi melakukan tugasnya dengan profesional dan bersih. Artinya, sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa anggota Kepolisian Republik Indonesia seringkali melakukan praktik kotor dalam kinerja yang dilakukan.



Gambar 1. 12 Sentimen Terhadap POLRI

*Sumber: Databoks*

Dari beragam permasalahan yang dialami oleh Kepolisian Republik Indonesia, institusi POLRI saat ini tengah dihadapkan pada rentannya

pemberitaan negatif serta citra berupa penilaian dan sentimen negatif oleh masyarakat Indonesia yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat (DataBoks, 2025). Pemberitaan hingga penilaian negatif yang dimiliki POLRI diakibatkan oleh masifnya berbagai kasus besar kontroversial yang melibatkan institusi tersebut, selain itu berbagai pengalaman khalayak yang didapatkan ketika mereka berinteraksi dengan Polisi menjadi faktor yang mendukung penilaian negatif khalayak kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Di satu sisi lain, peran POLRI bagi kehidupan masyarakat sangatlah erat karena Kepolisian Republik Indonesia saat ini masih satu-satunya lembaga eksekutif yang memberikan banyak pelayanan yang sangat penting mulai dari pembuatan SIM, SKCK, STNK hingga laporan pengaduan yang mudah diakses dan digunakan oleh setiap masyarakat baik itu secara langsung ataupun melalui *call center* yang disediakan. Layanan POLRI dianggap menjadi salah satu layanan yang multifungsional bagi kehidupan masyarakat dan sangat diperlukan terlebih layanan berupa pemenuhan aturan berkendara yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Saat ini, institusi POLRI cenderung memiliki kepercayaan yang fluktuatif dan sangat rentan memiliki kepercayaan yang rendah. Akibatnya, bukan menjadi hal yang tidak mungkin apabila nanti masyarakat memiliki sentimen, respons atau bahkan ketidakpercayaan terhadap layanan atau tindakan POLRI kedepannya. Hal ini jelas menjadi suatu masalah apabila jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat Indonesia.

Seharusnya, institusi POLRI memiliki penilaian dan kepercayaan yang stabil dan konsisten terlebih Kepolisian di Indonesia memiliki peran sentral dan strategis sebagai lembaga penegak hukum dan katalisator antara masyarakat dengan Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya untuk menganalisis lebih dalam untuk mengetahui mengenai pengaruh terpaan

informasi beredar di media sosial dan citra POLRI sebagai institusi negara terhadap kepercayaan publik pada POLRI sebagai lembaga negara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Secara ideal, Kepolisian Republik Indonesia harusnya memiliki penilaian dan tingkat kepercayaan tinggi yang tinggi, karena sejatinya Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dan sentral sebagai lembaga yang menjalankan beberapa fungsi strategis di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 pasal (2) dimana Kepolisian Republik Indonesia menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom hingga pelayan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002).

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai institusi negara seharusnya juga bisa menjalankan fungsi lembaga pelayan publik yang transparan, profesional, akuntabilitas serta supremasi hukum yang adil. Terlebih, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) juga menjalankan fungsi sebagai lembaga pelayanan publik yang mengharuskan POLRI menjalankan fungsi dan tugasnya sejalan dengan *good governance*. Sehingga, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi baik atau buruknya citra suatu institusi negara.

Namun pada kenyataannya, pada tahun 2025 lalu terdapat berbagai kasus besar yang melibatkan nama institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mengakibatkan pada masifnya pemberitaan negatif di *platform* media sosial hingga media konvensional yang berakibat pada negatifnya citra POLRI di mata masyarakat Indonesia. Berbagai kasus besar yang pernah terjadi seperti aksi baku hantam dengan para massa pendemo hingga mengakibatkan tewasnya ojek online bernama Affan Kurniawan karena dilindas dengan kendaraan taktis pada bulan Agustus tahun 2025, pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum polisi sebanyak 6 orang kepada Mata Elang (*Debt Collector*) hingga tewas yang terjadi di daerah Kalibata, Jakarta Selatan, kasus pengesahan RUU POLRI dan RUU KUHP yang dianggap memberikan wewenang dan supremasi hukum

yang besar kepada pihak Kepolisian, penganiyaan penjual es gabus di wilayah Depok, hingga kasus tindak pidana yang diberikan kepada Hogi di wilayah Sleman.

Selain itu, lambatnya penanganan serta penyangkalan yang dilakukan oleh POLRI semakin membuat publik geram hingga muncul tagar '#A.C.A.B' dan '#1.3.1.2' di berbagai media sosial. Tak jarang publik menyampaikan komentar dan publikasi yang negatif akibat dari kasus yang terjadi sebagai bentuk amarah, kritik emosional terhadap Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dari masifnya terpaan informasi mengenai deretan kasus-kasus yang menimpa POLRI telah membawa pada rendahnya citra Kepolisian di mata masyarakat Indonesia yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI. Hal ini terbukti dari beberapa penilaian masyarakat atas pelayanan, kinerja, hingga sentimen yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat pun berharap Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) seharusnya segera untuk memperbaiki permasalahan yang melibatkan nama institusi POLRI dengan tujuan untuk menciptakan kembali penilaian positif dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap institusi POLRI. Karena di satu sisi lain, POLRI masih menjadi lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas fungsi pokok yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Oleh karena itu, hal ini memperlihatkan terjadinya kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi aktual yang terjadi saat ini hingga menimbulkan pertanyaan apakah terdapat pengaruh antara terpaan informasi deretan kasus POLRI dan citra POLRI sebagai institusi negara terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan informasi deretan kasus POLRI dan citra POLRI sebagai institusi negara terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia.

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Penelitian diharapkan mampu untuk memperluas wawasan di dalam lingkup kajian Ilmu Komunikasi terutama di bidang manajemen krisis. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan juga mampu mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh terpaan informasi deretan kasus POLRI dan citra POLRI terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia. Terakhir, penelitian diharapkan mampu berperan sebagai sumber referensi pada studi-studi serupa di masa yang akan datang.

### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan bagi institusi POLRI dalam melakukan evaluasi dan rancangan strategis dalam melakukan manajemen krisis sebagai bentuk antisipasi atas kasus-kasus yang mungkin bisa saja terjadi. Dengan mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi kepercayaan POLRI, institusi POLRI diharapkan mampu menyusun strategi komunikasi krisis yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan dan citra POLRI sebagai institusi negara.

### **1.4.3 Signifikansi Sosial**

Penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu masyarakat dalam menyikapi terpaan pemberitaan yang tersebar di media sosial secara kritis melalui apa yang masyarakat lihat ataupun baca. Diharapkan melalui penelitian ini terciptanya hubungan yang baik antara institusi negara POLRI dan masyarakat melalui kepercayaan ataupun partisipasi berdasarkan pengalaman yang objektif dan pelayanan yang nyata.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 State of The Art

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan pencarian dan analisis pada literatur terdahulu yang relevan mengenai topik antara terpaan informasi, citra lembaga terhadap sikap berupa kepercayaan publik.

Penelitian pertama berjudul “*The impact of media exposure and political party orientation on public perceptions of police in Taiwan.*” yang diteliti oleh Ivan Y. Sun, Yuning Wu, Ruth Triplett, dan Shun-Yung Kevin Wang dan diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh paparan media dan orientasi politik terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat Taiwan terhadap kepolisian Taiwan. Penelitian ini dilakukan dengan Teknik *random sampling* dan dengan jumlah responden sebanyak 2.180 dengan berbagai klasifikasi mulai dari usia, jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal untuk memastikan sampel sesuai dengan populasi yang ada. Teori *Media Effects* digunakan dalam penelitian tersebut untuk melihat bahwa penekanan media pada berita-berita negatif kepolisian di Taiwan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dan kepuasan terhadap instansi pemerintah. Selain itu, teori *Political Identity* digunakan untuk melihat apakah orientasi masyarakat terhadap perbedaan politik juga mempengaruhi penilaian yang diberikan kepada pemerintah termasuk kepolisian Taiwan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif yang signifikan antara masyarakat Taiwan yang terpapar pemberitaan negatif mengenai perilaku buruk kepolisian dan mempercayai pemberitaan tersebut sebagai penilaian yang diberikan dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan yang rendah. Selain itu, masyarakat yang memiliki orientasi dukungan partai politik yang oposisi atau netral juga cenderung memberikan penilaian yang rendah kepada kepolisian Taiwan. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat

Taiwan yang memiliki orientasi politik dominan menunjukkan bahwa mereka memberikan penilaian berupa kepercayaan dan kepuasan yang lebih tinggi (Sun et al., 2016).

Penelitian selanjutnya berjudul '*Exploring the impact of patients' risk-benefit and knowledge perceptions on trust and intention to use AI-based medical imaging tools in radiology*' yang diteliti oleh Hasan Alipanahzadeh, Eli Eikefjord, dan Max Korbmacher dan diterbitkan pada tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepercayaan dalam penggunaan perkembangan teknologi AI terutama dalam diagnosis yang dihasilkan dari AI Radiologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuantitatif, melalui survei dengan total 297 responden, analisis yang digunakan berupa teknik regresi linear berganda. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory Reasoned Action* sebagai teori utama yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sikap dan norma sosial terhadap kecenderungan untuk berperilaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan semakin tinggi norma atau tekanan sosial maka kecenderungan perilaku semakin meningkat terlebih jika memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (Alipanahzadeh et al., 2026)

Penelitian serupa selanjutnya berjudul "*Media consumption and perceptions of police legitimacy.*" yang diteliti oleh Lisa M. Graziano dan Jane Florence Gauthier dan diterbitkan pada tahun 2018 yang lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dari *Cultivation Theory* mengenai efek media terhadap persepsi dan penilaian publik kepada kepolisian, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah jenis konsumsi media, kesadaran akan laporan media negatif dan pengalaman langsung pada kepolisian mempengaruhi citra kepolisian serta membandingkan pengaruh tersebut dengan kinerja harian layanan yang diberikan oleh kepolisian. Responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 1.197 penduduk yang berfokus pada wilayah

California, Amerika Serikat yang diklasifikasikan lagi pada berbagai etnis untuk memastikan representasi atau penilaian masyarakat yang heterogen. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk menguji efek dari konsumsi media, pengalaman pada kepercayaan terhadap kepolisian, sementara landasan teori yang digunakan adalah *Cultivation Theory* sebagai landasan utama untuk melihat apakah konsumsi media secara terus-menerus dapat menanamkan penilaian tertentu terhadap kepolisian dan *Procedural Justice Theory* yang digunakan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan polisi yang diberikan saat berinteraksi langsung dengan masyarakat dapat mempengaruhi penilaian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengandalkan media sebagai sumber informasi cenderung melihat kepolisian dengan penilaian yang rendah, serta kesadaran akan pemberitaan yang negatif secara independen menurunkan kepercayaan. Sementara, bagi masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan kepolisian cenderung memberikan penilaian yang cukup baik. Disimpulkan bahwa media memiliki peran nyata dalam membentuk penilaian tetapi pengalaman secara langsung juga bisa menjadi faktor penahan sehingga kepolisian juga harus memperhatikan bagaimana mereka direpresentasikan di dalam pemberitaan media (Graziano & Gauthier, 2018).

Penelitian selanjutnya berjudul “*News media consumption and attitudes about police: in search of theoretical orientation and advancement.*” yang diteliti oleh Jane Florence Gauthier dan Lisa M. Graziano dan diterbitkan pada tahun 2018 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menguji premis pada teori kultivasi terhadap kinerja kepolisian, menilai dampak dari waktu yang dihabiskan audiens ketika mereka menerima paparan informasi dan jenis medianya serta sejauh mana audiens mampu untuk menilai objektivitas berita mempengaruhi sikap mereka. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 1.197 responden yang tinggal di wilayah California, Amerika Serikat.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi untuk menentukan pengaruh hubungan antara variabel konsumsi media dengan sikap terhadap kepolisian. Sementara itu, teori yang digunakan adalah *Cultivation Theory* untuk menguji apakah konsumsi berita secara akumulatif mampu menanamkan pandangan sesuai dengan apa yang disajikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari jenis konsumsi media berbeda terhadap bagaimana masyarakat menilai kepolisian, masyarakat yang mengkonsumsi media konvensional seperti televisi memiliki penilaian yang cenderung positif sementara masyarakat yang terpapar informasi melalui media internet cenderung memiliki penilaian yang negatif. Selain itu, jumlah konsumsi media secara akumulatif tidak berkorelasi secara langsung terhadap sikap tetapi tentang ‘apa’ dan ‘bagaimana’ audiens menilai konten lebih berpengaruh. Penilaian konten oleh audiens memainkan peran keadilan, dimana persepsi masyarakat tentang suatu berita itu adil atau tidak sangat mempengaruhi efek dari berita yang dihasilkan (Gauthier & Graziano, 2018).

Penelitian selanjutnya berjudul “*News media and perceptions of Police: A State of the Art review.*” yang diteliti oleh Lisa M. Graziano dan diterbitkan pada tahun 2018 lalu. Penelitian ini dilakukan untuk dengan merangkum berbagai penelitian sebelumnya secara sistematis untuk mengukur temuan tentang bagaimana konsumsi masyarakat pada pemberitaan media berita dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap institusi Kepolisian. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan studi sebelumnya sebanyak 42 penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya dan mencakup berbagai populasi didalamnya, namun dalam penelitian yang dihasilkan mayoritas berfokus pada masyarakat yang tinggal di wilayah Amerika Serikat, Taiwan dan juga China. Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan *Systematic Literature Reviews* (SLR) untuk mengumpulkan berbagai data dari penelitian sebelumnya dan menggabungkan angka yang ada untuk mendapatkan kesimpulan

terbaru pada penelitian yang terbaru. Dari hasil penemuan penelitian, teori yang paling banyak digunakan diantaranya adalah *Cultivation Theory* dimana teori tersebut menyatakan bahwa media membentuk realitas sosial di benak masyarakat, *Agenda-Setting Theory* dimana media menentukan topik apa yang dianggap penting untuk diberikan kepada masyarakat dengan frekuensi pemberitaan yang tinggi serta *Priming Effects Theory* untuk memicu ingatan atau penilaian masyarakat ketika mereka diminta penilaian untuk mengevaluasi kinerja kepolisian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara berita negatif yang diberitakan oleh media terhadap kepercayaan dan penilaian publik terhadap instansi kepolisian. Namun, dalam penelitian yang dilakukan masih berfokus pada media konvensional seperti televisi, radio dan surat kabar sehingga peran media digital masih perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut untuk melihat hubungan kausalitasnya (Graziano, 2019).

Berbagai penelitian terdahulu telah menggunakan beragam variabel untuk dianalisis, yang mana beberapa diantaranya memiliki kesamaan dengan variabel yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Beragam konsep teori juga sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga peneliti memilih mengkombinasikan variabel terpaan informasi dan citra POLRI untuk menguji pengaruhnya terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia dengan berlandaskan pada teori *cultivation theory* dan *attitudes theory*.

Diantara berbagai penelitian sebelumnya masih berfokus pada cakupan media massa yang bersifat konvensional, dan hanya melihat persepsi sebagai sesuatu yang dukur. Sehingga belum banyak peneliti yang melakukan pengamatan pada media *digital* dan mengukur bagaimana suatu citra dapat mempengaruhi sikap berupa kepercayaan publik pada institusi Kepolisian.

### **1.5.2 Paradigma Penelitian**

Pada penelitian yang dilakukan akan menggunakan paradigma positivistik. Paradigma positivistik merupakan cara pandang yang melihat suatu peristiwa sebagai sesuatu yang benar terjadi secara objektif. Di dalam paradigma positivistik memandang bahwa setiap fakta, gejala, fenomena atau bahkan realita dapat diamati dengan menambahkan unsur eksperimen dan hasil yang logis, terukur serta memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar gejala (Irawati et al., 2021). Di dalam penelitian ini, variabel kausalitas yang akan diteliti adalah pengaruh terpaan informasi deretan kasus POLRI dan citra POLRI sebagai institusi negara terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia.

### **1.5.3 Deskripsi Variabel**

#### **1.5.3.1 Terpaan Informasi Deretan Kasus POLRI**

Terpaan atau paparan informasi melekat dengan suatu proses kontak penerimaan pesan oleh pengguna pada suatu objek pesan tertentu yang dikirimkan melalui saluran komunikasi interpersonal atau *platform* media massa (Zhang & Pang, 2025). Terpaan informasi terjadi apabila individu membaca, menonton atau bahkan mendengar yang kemudian diikuti dengan munculnya efek baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membentuk persepsi di dalam dirinya terhadap suatu pesan tersebut, terpaan informasi dapat menimbulkan suatu efek dan dapat diamati apakah merubah perilaku individu atau tidak (Umniyati et al., 2017).

Terpaan informasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, dan dioperasionalisasikan dalam tiga dimensi, diantara dari dua jenis terpaan adalah *intentional exposure* dan *accidental exposure*. *Intentional exposure* merupakan terpaan informasi dimana individu secara aktif untuk mencari tahu mengenai suatu informasi karena alasan tertentu, sementara *accidental exposure* merupakan terpaan informasi

yang diterima oleh individu akibat ketidaksengajaan (Peter & Olson, 2013).

Terpaan informasi dapat diperasionalisasikan menjadi 3 dimensi untuk melihat seberapa besar pengaruh informasi yang diberikan kepada khalayak. Menurut Rosengren, terpaan informasi dapat dioperasionalkan berdasarkan tiga dimensi yakni: (1) frekuensi individu dalam menerima informasi, yakni kecenderungan informasi yang dibaca, dilihat atau didengar oleh khalayak (2) durasi yang dihabiskan individu untuk membaca, melihat, atau mendengar suatu pesan, hingga (3) intensitas hubungan atau tingkat pemahaman individu dengan isi pesan yang diberikan, berkaitan dengan kedalaman pemahaman khalayak pada suatu informasi yang diterima (Umniyati et al., 2017).

1. Frekuensi (*frequency*): Tingkat keseringan informasi pesan yang dibaca, ditonton, atau didengar dari suatu media pengirim pesan
2. Durasi (*duration*): Waktu yang digunakan individu untuk memperhatikan isi pesan yang disampaikan melalui media yang dikonsumsi atau digunakan
3. Intensitas (*intensity*): Tingkat pemahaman individu terhadap suatu isi pesan yang disampaikan oleh media (Valiant & Gassing, 2023)

### **1.5.3.2 Citra POLRI Sebagai Institusi Negara**

Citra merupakan sebuah pikiran berupa representasi keseluruhan dari persepsi dan perasaan tentang suatu produk yang dimaknai oleh khalayak terhadap suatu lembaga (Kotler & Armstrong, 2018). Citra berperan sebagai penilaian yang diberikan oleh khalayak terhadap suatu lembaga atau instansi hasil dari informasi yang diterima dan digabungkan dengan pengalaman individu hingga yang menjadi suatu penilaian. Penilaian positif akan menghasilkan citra positif pada

kepercayaan, partisipasi publik serta mempertahankan eksistensinya, sementara sebaliknya, penilaian negatif akan menghasilkan citra yang negatif oleh khalayak kepada suatu lembaga atau perusahaan.

Citra tidak terbentuk begitu saja, tetapi melalui beberapa elemen yang menentukan bagaimana suatu lembaga atau perusahaan memiliki citra di benak khalayak. Diantara dari beberapa elemen tersebut adalah (1) *Personality*, (2) *Reputation*, (3) *Value*, (4) *Coorporate identity* (Anggraelin et al., 2023).

1. *Personality*, yakni keseluruhan karakteristik yang dipahami oleh publik meliputi kepercayaan dan keyakinan akan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga.
2. *Reputation*, reputasi mengarah pada hal-hal yang pernah dilakukan dan diyakini oleh publik berdasarkan pengalaman yang ada baik sendiri maupun dari orang lain. Reputasi menekankan pada keyakinan terhadap kinerja atau manfaat yang diberikan kepada publik.
3. *Value*, nilai-nilai yang menjadi dasar filosofi bagi suatu lembaga atau perusahaan dalam menjalankan kebijakan, tugas yang berkaitan dengan pihak internal ataupun interaksi dengan pihak eksternal.
4. *Coorporate identity*, elemen pendukung yang merupakan komponen-komponen yang memudahkan publik untuk mengenal terhadap suatu lembaga atau perusahaan

### **1.5.3.3 Kepercayaan Publik Pada Kepolisian Republik Indonesia**

Kepercayaan Publik menurut Hetherington didefinisikan sebagai sikap positif masyarakat terhadap pemerintah dan institusinya. Kepercayaan publik menjadi konsep yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap pemerintah/lembaga yang didasarkan pada seberapa baik suatu pemerintah/lembaga dalam menjalankan tugas (transparan,

integritas dan akuntabilitas), fungsi dan sesuai dengan harapan normatif masyarakat. Kepercayaan menjadi penting karena mampu mempengaruhi efektivitas kebijakan publik, apabila mempunyai kepercayaan maka publik akan mendukung tetapi sebaliknya, jika kepercayaan buruk maka publik cenderung memiliki sikap resistensi (Azhary et al., 2024)

Kepercayaan publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kinerja yang diberikan, serta bagaimana media menyajikan informasi mengenai pemerintah atau lembaga tersebut. Jika media cenderung menyajikan informasi yang bersifat negatif, maka masyarakat akan memiliki kecenderungan untuk tidak percaya terhadap lembaga pemerintah (Pranata, 2025).

Menurut Mowen dan Minor menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk dari kepercayaan, diantaranya adalah: (1) Kepercayaan atribut objek yang meliputi pengetahuan tentang suatu objek, peristiwa atau bahkan kepercayaan pada suatu objek tersebut yang menjadi penghubung pada suatu lembaga, (2) Kepercayaan manfaat pada produk/jasa yang diberikan, dimana seseorang akan mencari dan menilai pada suatu produk/jasa yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan, dan (3) Kepercayaan manfaat objek, meliputi kepercayaan yang terbentuk karena adanya hubungan antara objek dengan manfaatnya, kepercayaan ini merupakan persepsi individu seberapa jauh produk/jasa yang akan memberikan manfaat (Caniago, 2022).

Selain itu, menurut Maharani juga menyatakan terdapat 4 indikator dari kepercayaan yaitu: (1) keandalan, (2) kejujuran, (3) kepedulian, dan (4) kredibilitas dimana indikator tersebut menjadi faktor yang menentukan apakah kepercayaan itu dapat dikatakan baik atau justru sebaliknya (Caniago, 2022).

#### **1.5.3.4 Pengaruh Terpaan Informasi Kasus POLRI Terhadap Kepercayaan Publik Pada Kepolisian Republik Indonesia**

Untuk menjelaskan pengaruh terpaan informasi deretan kasus POLRI yang beredar di media sosial terhadap citra POLRI dapat dijelaskan menggunakan *Cultivation Theory* yang dikemukakan oleh George Gerbner pada tahun 1969. George Gerbner menyatakan bahwa teori kultivasi mempunyai anggapan bahwa audiens yang mendapati tayangan informasi dengan rentan waktu yang lama akan memiliki sebuah pemahaman dan kepercayaan baru sesuai dengan realita berdasarkan seberapa banyak mereka menerima informasi tersebut (Junaidi, 2018).

Dalam praktiknya, audiens yang mengkonsumsi media televisi dibagi menjadi dua jenis: (1) *heavy viewers*, dan (2) *light viewer* yang bertujuan untuk melihat efek yang dihasilkan dari tayangan yang diberikan oleh media televisi. Terdapat empat proses menurut gagasan teori kultivasi, diantaranya adalah:

1. *Message system*, analisis mengenai isi program yang disampaikan
2. *Formulation of question about viewers*, pertanyaan yang diberikan kepada audiens dan berkaitan dengan realitas sosial penonton
3. *Survey the audience*, menanyakan kepada audiens seputar apa yang mereka konsumsi dari media, dan;
4. Membandingkan realitas sosial yang dipahami antara *heavy viewers* dan *light viewers*.

Dari keempat proses diatas, George Gerbner menyederhanakan kembali proses diatas menjadi dua jenis analisis yakni: (1) *content analysis*, untuk mengidentifikasi tema yang disajikan dan (2) *audience research*, untuk melihat pengaruh tema yang ditentukan pada audiens. George Gerbner menyatakan bahwa audiens dengan kategori *heavy viewers* cenderung melihat dunia sebagai ketakutan akibat terpaan

pemberitaan kekerasan yang sering dilihat di media. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang digagas oleh Rosengren dimana terpaan informasi menciptakan efek berupa perubahan sikap atau keyakinan dan dapat dioperasionalisasikan berdasarkan tiga dimensi yakni: (1) frekuensi individu dalam menerima informasi, (2) durasi yang dihabiskan individu untuk membaca, melihat, atau mendengar suatu pesan, hingga (3) intensitas hubungan atau tingkat pemahaman individu dengan isi pesan yang diberikan (Umniyati et al., 2017)

Dalam prosesnya, teori kultivasi dibagi menjadi dua jenis yakni (1) *first order effects* dan (2) *second order effects*. *First order* merupakan keyakinan individu yang dihasilkan dari realitas yang diterima, sementara *second order effects* berkaitan dengan sikap, keyakinan dan penilaian individu dari hasil keyakinan terhadap realitas yang diyakini. Dalam konteks ini, teori kultivasi bertujuan untuk melihat persepsi atas berbagai tindakan kasus-kasus yang melibatkan POLRI terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia (Cöster, n.d.)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu telah menguji asumsi teori kultivasi yang mampu menjelaskan terpaan informasi dapat mempengaruhi kepercayaan individu, penelitian pertama berjudul “*Social media, misinformation, and cultivation of informational mistrust: Cultivating Covid-19 mistrust.*” yang diteliti oleh Yong Jin Park, Jae Eun Chung, dan Jeong Nam Kim pada tahun 2022. Penelitian tersebut berfokus pada *second order effects* yang menunjukkan bahwa terpaan informasi *misinformation* dapat mempengaruhi *mistrust* dan *belief confidence* pada audiens yang terpapar informasi (Park et al., 2022).

Selain itu, terdapat beberapa hasil penelitian lain yang berjudul “*A Question of Time? A Longitudinal Analysis of the Relationship between News Media Consumption and Political Trust.*” yang diteliti

oleh Jesper Stromback, Monila Djerf-Pierre dan Adam Shehata pada tahun 2016. Penelitian tersebut mempunyai hipotesis bahwa semakin tinggi penggunaan dan terpaan yang berasal dari media mampu memberikan tingkat kepercayaan publik pada politik, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat konsumsi dan terpaan media akan menyebabkan tingginya kepercayaan politik (Strömbäck et al., 2016).

Terakhir, jurnal “Pengaruh Terpaan Informasi Media Sosial Terhadap Tingkat Kepercayaan Publik Pada Pemilihan Umum 2024.” yang diteliti oleh Indah Mardini Putri dan Bunga Astini di tahun 2024 bertujuan untuk menguji pengaruh terpaan informasi terhadap tingkat kepercayaan publik pada pemilihan umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara terpaan informasi di media sosial terhadap kepercayaan publik pada pemilihan umum di tahun 2024 meskipun secara statistik tidak memiliki kekuatan hubungan yang besar (I. M. Putri & Astini, 2024)

Berdasarkan paparan logika diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *Cultivation Theory* dapat menjelaskan bahwa terpaan informasi berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia.

#### **1.5.3.5 Pengaruh Citra POLRI Sebagai Institusi Negara Terhadap Kepercayaan Publik Pada Kepolisian Republik Indonesia**

Untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan publik bisa dipengaruhi oleh citra POLRI dapat dijelaskan melalui *Theory Reasoned Action* yang digagas oleh Martin Fishebin dan Icek Ajzen.

Dalam gagasan yang dinyatakan Fishebin dan Ajzen mengenai *reasoned action* menjelaskan bahwa perilaku individu terbentuk karena dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang dibentuk dari dua faktor diantaranya yakni (1) sikap, yang merupakan penilaian individu

terhadap suatu objek atau perilaku yang diamati/dilihat dan (2) normal sosial yang mengacu pada tekanan sosial yang dialami oleh individu di lingkungan sosial. Dalam konteks ini, citra merupakan bagian dari sikap yang merupakan penilaian individu terhadap institusi POLRI dan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh anggota POLRI. Sementara norma sosial yang berlaku dalam konteks penelitian ini adalah berbagai kritik serta penilaian kolektif masyarakat terhadap institusi POLRI yang berpotensi sebagai pendukung perubahan perilaku individu (Alipanahzadeh et al., 2026)

Selain itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dengan menguji bahwa citra memiliki pengaruh terhadap kepercayaan, penelitian yang berjudul “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian melalui Kepercayaan Konsumen pada Produk Stuck Original” yang diteliti oleh Dian Wahyu Pratama dan Suryono Budi Santoso pada tahun 2018. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji apakah citra suatu merek memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen pada produk stuck original yang akan mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen pada suatu produk, citra yang positif terbukti dapat membuat tingkat kepercayaan konsumen menjadi positif yang berpengaruh juga terhadap keputusan pembelian (Pratama & Santoso, 2018).

Jurnal penelitian lain berjudul “Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Kepercayaan Konsumen dan Dampaknya pada Keputusan Pembelian Online di Marketplace Shopee di Kabupaten Bireuen.” yang diteliti oleh Muhammad Ferdianda Chadafi dan Kamaruddin Kamaruddin pada tahun 2021 telah menguji bahwa citra perusahaan memiliki pengaruh terhadap kepercayaan dengan arah hubungan positif. Artinya, semakin baik citra perusahaan maka akan semakin

tinggi juga tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan (Chadafi, 2021)

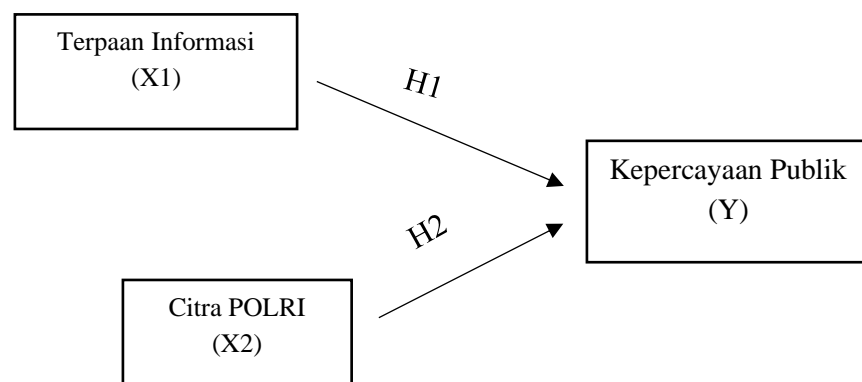
Jurnal terakhir, berjudul “Pengaruh Citra Merek dan Ulasan Pelanggan terhadap Kepercayaan Konsumen Shopee di Medan Johor.” yang diteliti oleh (Sitanggung et al., 2025) telah menguji bahwa citra merek mampu untuk mempengaruhi kepercayaan konsumen secara signifikan dengan arah hubungan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek yang positif mencerminkan reputasi dan kredibilitas perusahaan yang penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Citra positif juga mencerminkan beberapa aspek diantaranya adalah persepsi, reputasi, dan nilai-nilai dasar perusahaan.

Berdasarkan paparan logika diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *Theory Reasoned Action* dapat menjelaskan bahwa citra berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) (Alipanzadeh et al., 2026)

## 1.6 Hipotesis

- Ha1 : Terdapat pengaruh terpaan informasi deretan kasus POLRI terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia
- Ha2 : Terdapat pengaruh positif citra POLRI sebagai institusi negara terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia

Gambar 1. 13 Kerangka Berpikir



## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Pengaruh Terpaan Informasi**

Terpaan informasi didefinisikan sebagai suatu proses kontak penerimaan pesan melalui membaca, mendengar, melihat yang kemudian diikuti dengan terbentuknya persepsi di dalam diri individu. Untuk melihat efek yang diciptakan dari terpaan informasi dapat dilihat berdasarkan tiga dimensi yakni: (1) frekuensi individu dalam menerima informasi, (2) durasi yang dihabiskan individu untuk membaca, melihat, atau mendengar suatu pesan, hingga (3) intensitas hubungan atau tingkat pemahaman individu dengan isi pesan yang diberikan.

### **1.7.2 Citra POLRI Sebagai Institusi Negara**

Citra didefinisikan sebagai representasi keseluruhan dari persepsi tentang suatu lembaga yang dimaknai oleh khalayak. Citra juga berperan sebagai nilai yang diwakilkan dan didasarkan pada dua nilai yakni nilai citra positif atau nilai citra negatif yang melibatkan unsur kepercayaan, ataupun penilaian keseluruhan.

### **1.7.3 Kepercayaan Publik Pada Kepolisian Republik Indonesia**

Kepercayaan publik didefinisikan sebagai sikap positif masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Kepercayaan publik juga menjadi konsep yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap pemerintah/lembaga yang didasarkan pada seberapa baik suatu pemerintah/lembaga dalam menjalankan tugas (transparan, integritas dan akuntabilitas).

## **1.8 Definisi Operasional**

### **1.8.1 Pengaruh Terpaan Informasi**

- a. *Frequency* (Frekuensi)

Seberapa sering responden melihat, membaca, atau mendengar informasi mengenai kasus yang melibatkan Kepolisian Republik Indonesia

b. *Duration* (Durasi)

Seberapa lama waktu yang dihabiskan responden dalam memperhatikan dan menerima isi pesan informasi yang disampaikan melalui media

c. *Intensity* (Intensitas)

Seberapa kuat berita mengenai informasi negatif POLRI dalam pemberitaan media sosial yang dikonsumsi oleh responden.

### 1.8.2 Citra POLRI Sebagai Institusi Negara

a. *Personality*

Responden mampu memberikan penilaian terhadap personel POLRI dalam menjalankan tugasnya

b. *Value* (Nilai)

Responden mampu memberikan penilaian terhadap POLRI berdasarkan nilai yang digunakan oleh POLRI yaitu 'PRESISI'

c. *Reputation* (Reputasi)

Responden memberikan penilaian mereka terhadap institusi POLRI secara keseluruhan melalui konsep *good governance*

d. *Corporate Identity*

Responden mampu untuk memberikan penilaian terhadap identitas yang dibangun oleh POLRI sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat

### 1.8.3 Kepercayaan Publik Pada Kepolisian Republik Indonesia

a. Keandalan

Responden mampu memberikan penilaian seberapa profesional dan kompeten Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya.

## b. Kejujuran

Responden mampu memberikan penilaian kepada POLRI pada kejujuran dan integritas dalam proses pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

## c. Kepedulian

Responden mampu memberikan penilaian kepada POLRI terhadap kepedulian POLRI pada seluruh lapisan masyarakat dan tidak membedakan berdasarkan kriteria tertentu.

## d. Kredibilitas

Responden mampu memberikan penilaian mengenai kredibilitas POLRI dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengamanan, dan penegakan hukum di lapisan masyarakat

Tabel 1. 1Matriks Penelitian

Matriks			
“Pengaruh Terpaan Deretan Kasus POLRI dan Citra POLRI Sebagai Institusi Negara Terhadap Kepercayaan Publik Pada Kepolisian Republik Indonesia.”			
Variabel	Dimensi	Indikator Pertanyaan	Skala Pengukuran
Terpaan Informasi Deretan Kasus POLRI	Frekuensi ( <i>Frequency</i> )	1. Seberapa sering Anda melihat, membaca, dan mendengar informasi tentang institusi Kepolisian Republik Indonesia?  - Televisi - Media sosial - Website - IM - Radio - Koran	Skala Likert (1-4) 1: Tidak pernah 2: Jarang 3: Sering 4: Selalu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majalah</li> </ul> <p>2. Seberapa sering Anda melihat, membaca, dan mendengar kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Televisi</li> <li>- Media sosial</li> <li>- Website</li> <li>- IM</li> <li>- Radio</li> <li>- Koran</li> <li>- Majalah</li> </ul>	
	<p>Durasi (<i>Duration</i>)</p>	<p>1. Berapa lama waktu yang biasanya Anda habiskan untuk melihat, membaca, atau mendengar informasi tentang institusi Kepolisian Republik Indonesia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Televisi</li> <li>- Media sosial</li> <li>- Website</li> <li>- IM</li> <li>- Radio</li> <li>- Koran</li> <li>- Majalah</li> </ul>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Tidak pernah 2: 1-60 menit 3: 61-120 menit 4: &gt; Lebih dari 120 menit</p>

		<p>2. Berapa lama waktu yang biasanya Anda habiskan untuk melihat, membaca, atau mendengar kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Televisi</li> <li>- Media sosial</li> <li>- Website</li> <li>- IM</li> <li>- Koran</li> <li>- Radio</li> <li>- Majalah</li> </ul>	
	Intensitas ( <i>Intensity</i> )	<p>1. Saya memahami secara penuh mengenai peran dan tanggungjawab institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelindung, pengayom, dan pengaman masyarakat</p> <p>2. Saya memahami informasi keseluruhan mengenai deretan kasus-kasus</p>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>

		<p>pelanggaran yang melibatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia belakangan ini.</p> <p>3. Saya mampu mengingat beberapa deretan kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia.</p>	
Citra POLRI Sebagai Institusi Negara	<i>Personality</i>	<p>1. Saya menilai bahwa POLRI dalam menegakan hukum tetap bertindak humanis</p> <p>2. Saya menilai bahwa setiap anggota POLRI mampu untuk melayani masyarakat dengan tulus.</p> <p>3. Saya menilai bahwa pelayanan yang diberikan POLRI mengikuti perkembangan zaman.</p>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>
	<i>Value</i>	<p>1. Saya menilai bahwa POLRI mampu</p>	<p>Skala Likert (1-4)</p>

		<p>mengantisipasi terjadinya kasus-kasus besar.</p> <p>2. Saya menilai bahwa POLRI sudah menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menangani laporan masyarakat.</p> <p>3. Saya merasa bahwa layanan yang diberikan POLRI sudah memenuhi kebutuhan masyarakat</p> <p>4. Saya merasa proses penegakan hukum oleh POLRI sudah terbuka dan jujur.</p>	<p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>
	<i>Reputation</i>	<p>1. Saya menilai bahwa POLRI sudah baik dalam menjalankan tugasnya</p> <p>2. Saya menilai bahwa POLRI memiliki nama baik di kalangan masyarakat</p> <p>3. Saya menilai bahwa POLRI dapat menyelesaikan</p>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>

		kasus-kasus laporan dengan baik.	
	<i>Corporate identity</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya menilai bahwa POLRI menjadi lembaga dengan supremasi hukum yang kuat di Indonesia.</li> <li>2. Saya menilai bahwa POLRI dalam menghadirkan rasa sebagai pelindung masyarakat.</li> <li>3. Saya merasa bahwa POLRI sudah sesuai dengan nilai PRESISI (PREdikti, responSibilitas, transparanSI berkadilan) dalam menjalankan tugasnya.</li> </ol>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>
Kepercayaan Publik Pada Kepolisian Republik Indonesia	Kehandalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya percaya kepada POLRI mampu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.</li> <li>2. Saya percaya kepada POLRI dalam menangani kasus</li> </ol>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>

		<p>penegakan hukum di Indonesia.</p> <p>3. Saya percaya kepada POLRI dalam menyelesaikan setiap kasus secara profesional.</p> <p>4. Saya percaya bahwa POLRI menjadi lembaga yang mampu diandalkan.</p> <p>5. Saya percaya bahwa POLRI selalu memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap</p>	
	Kejujuran	<p>1. Saya percaya bahwa POLRI dalam menjalankan tugasnya secara jujur.</p> <p>2. Saya percaya bahwa POLRI dalam menjalankan tugasnya tidak mengharapkan imbalan diluar ketentuan (pungutan liar).</p> <p>3. Saya percaya bahwa POLRI dalam menjalankan</p>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>

		<p>tugasnya tidak melibatkan nepotisme (orang dalam).</p> <p>4. Saya percaya bahwa POLRI memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.</p>	
	Kepedulian	<p>1. Saya percaya bahwa POLRI memberikan layanan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>2. Saya percaya bahwa POLRI memberikan pelayanan secara baik, ramah dan sopan.</p> <p>3. Saya percaya bahwa POLRI sebagai pihak penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.</p> <p>4. Saya percaya bahwa POLRI memberikan pelayanan secara cepat dan responsif.</p>	<p>Skala Likert (1-4)</p> <p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>
	Kredibilitas	<p>1. Saya percaya bahwa POLRI berperan</p>	<p>Skala Likert (1-4)</p>

		<p>sebagai pelayan masyarakat.</p> <p>2. Saya percaya bahwa POLRI berperan sebagai penegak hukum di Indonesia.</p> <p>3. Saya percaya bahwa POLRI berperan sebagai pelindung masyarakat.</p> <p>4. Saya percaya bahwa POLRI berperan sebagai pengayom masyarakat.</p> <p>5. Saya percaya bahwa POLRI berperan sebagai pengaman masyarakat.</p> <p>6. Saya percaya bahwa POLRI memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat</p>	<p>1: Sangat Tidak Setuju</p> <p>2: Tidak Setuju</p> <p>3: Setuju</p> <p>4: Sangat Setuju</p>
--	--	--	---

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Peneliti berusaha menjelaskan pengaruh terpaan informasi deretan kasus POLRI (X1) dan citra POLRI sebagai institusi negara (X2) terhadap kepercayaan publik pada Kepolisian Republik Indonesia (Y).

### 1.9.2 Populasi

Populasi merujuk pada suatu kelompok atau elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dan kemudian ingin diteliti serta diambil kesimpulannya (Jailani & Jeka, 2023). Populasi dalam penelitian adalah laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 45 tahun yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK).

### **1.9.2.1 Kriteria**

Adapun jenis kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk menentukan karakteristik berupa

1. Laki-laki dan perempuan
2. Usia berusia 18 hingga 45 tahun (diklasifikasikan berdasarkan lintas generasi: Gen Y, Gen Z, dan Gen Millennial)
3. Pernah berinteraksi langsung dengan Polisi atau menerima layanan kinerja yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia
4. Memperoleh informasi tentang deretan kasus yang melibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dari media sosial atau media massa.

### **1.9.3 Sampel**

#### **1.9.3.1 Teknis Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *non-probability sampling* sebagai teknik penarikan sampel. Pada metode ini, tidak semua anggota populasi dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang memungkinkan peneliti untuk memilih partisipan sesuai dengan kriteria spesifik yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian (Rizky & Aguspriyani, 2023). Responden yang akan dianggap memenuhi kriteria adalah responden yang berusia sekitar 18-45 tahun, pernah berinteraksi langsung dengan kepolisian, serta menerima informasi dari media sosial ataupun media massa.

### **1.9.3.2 Jumlah Sampel**

Dalam penelitian ini akan melibatkan 150 responden sebagai sampel yang ditetapkan. Penentuan jumlah sampel tersebut mengacu pada gagasan Roscoe yang menyatakan bahwa ukuran sampel akan dianggap cukup untuk penelitian biasanya berkisar pada 30 sampai 500 individu (Sk & S, 2024)

### **1.9.4 Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini akan memanfaatkan data kuantitatif sebagai jenis datanya. Data yang digunakan dibagi menjadi dua jenis diantaranya data primer sebagai sumber data utama yang didapatkan langsung dari partisipan melalui pengisian kuesioner berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian. Sementara data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan peneliti dari hasil literatur, ataupun sumber informasi lain yang mendukung penelitian.

### **1.9.5 Alat dan Teknis Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data primer, kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang telah disusun untuk dijawab oleh para responden yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pada proses pengumpulan data dilakukan dengan cara responden mengisi kuesioner yang telah disediakan dalam bentuk angket melalui *google form (self-administration survey)*.

### **1.9.6 Teknik Pengolahan Data**

#### **1.9.6.1 Editing**

Editing dilakukan sebagai tahapan awal penelitian yang dilakukan untuk pemeriksaan kembali kuesioner yang telah dijawab oleh responden. Data yang telah didapatkan akan dilihat kesingkronannya untuk memastikan

kelengkapan jawaban dalam upaya meminimalisir kekurangan, ketidaksesuaian atau bahkan kesalahan data.

#### **1.9.6.2 Coding**

Coding dilakukan sebagai proses klasifikasi jawaban pada kategori yang sudah ditetapkan dalam bentuk kode angka ataupun huruf. Coding dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dalam melakukan olah data berdasarkan variabel yang diteliti.

#### **1.9.6.3 Tabulasi**

Tabulasi dilakukan sebagai tahapan terakhir dengan melakukan penyusunan data yang telah diberikan kode menjadi bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis data.

#### **1.9.7 Skala Pengukuran**

Penelitian ini akan menggunakan skala pengukuran Likert 1-4 untuk mengukur sikap, pendapat, penilaian hingga persepsi responden terhadap kasus-kasus yang pernah menimpa institusi Kepolisian Republik Indonesia. Skala Likert dipilih karena dianggap lebih relevan melalui butiran yang merupakan indikator dari variabel yang direpresentasikan sehingga meminimalisir *central tendency bias* (Budiaji, 2018)

#### **1.9.8 Uji Validitas**

Uji Validitas instrumen penelitian diuji dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian dalam merepresentasikan tiap variabel ketika hendak diteliti (Azizah, 2025). Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila pertanyaan didalamnya mengungkapkan sesuatu pengukuran yang dijelaskan pada penelitian.

#### **1.9.9 Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas merupakan suatu metode untuk mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan yang digunakan untuk menilai konsistensi

instrumen penelitian ketika diterapkan berulang kali dalam kondisi yang serupa. Untuk melakukan Uji Reliabilitas akan menggunakan metode statistic Cronbach's Alpha melalui SPSS dengan indikator hasil uji 60% atau 0,6. (Azizah, 2025)

#### **1.9.10 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data yang telah didapatkan akan dianalisis menggunakan teknis pengolahan regresi linear sederhana, analisis yang melibatkan hubungan linear antara satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Tujuan dalam analisis regresi linear sederhana adalah untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan dependen serta membuat prediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen (Iba & Wardhana, 2024)